

Implementasi Kebijakan PP 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Studi Kompetensi Kualitas SDM Guru SMA Negeri Perkotaan di Jawa Timur)

Naskah diterima Tgl. 3 Maret 2011, Naskah disetujui Tgl. 25 Mei 2011.

Irtanto*), **Herrukmi Septa R*)**, **Supriyanta*)**, dan **Widodo Djati Sasongko*)**

ABSTRAK

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui kompetensi kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) guru Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) perkotaan di Jawa Timur dan mengetahui kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah daerah dalam mengimplementasikan PP No.19 Tahun 2005 sebagai upaya meningkatkan kapasitas kompetensi guru SMA negeri perkotaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi pedagogik, profesional, maupun sosial dalam kualifikasi kurang baik, sedangkan kompetensi kepribadian dalam kategori baik. Kebijakan daerah untuk mengimplementasikan PP 19 tahun 2005 di daerah penelitian dilakukan dengan mengeluarkan berbagai kebijakan daerah. Kebijakan daerah berupa SK Walikota tentang Tim Pengembangan Kurikulum. Selanjutnya untuk kepentingan meningkatkan kompetensi guru SMA pengaturannya melalui kebijakan Kepala Dinas Pendidikan atau dari kebijakan Kepala Sekolah SMA yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan daerahnya.

Kata Kunci: Kompetensi, pedagogik, kepribadian, profesional dan sosial

ABSTRACT

This study used a qualitative approach which aims to know the human resources quality of SMAN (Public Senior High School) teacher competence on urban in East Java, and to know the policies made by local government in implenting the PP (government regulated) No. 19 of 2005 as an effort to increase the capacity of urban SMAN teacher competence. The results showed that pedagogic, proffesional, and social competence was less qualified, while the competence of personality was in good categories. Local policies to implementing the PP 19 of 2005 in local of researc carried by issuing many local policies. Local policy in the form of Mayor's decree of Curriculum Development Team. Further to the interests of improving senior high school teacher competency set by the policy of the Head of Education Office or Midle High School Head policies adapted to local needs and capabilities.

Keywords: Competence, pedagogic, personality, proffesional and social.

***) Peneliti Pada Balitbang Provinsi Jawa Timur**

PENDAHULUAN

Berbagai upaya pemerintah untuk meningkatkan mutu guru telah banyak dilakukan, seperti perbaikan berbagai regulasi, sarana-prasarana termasuk di dalamnya keperluan bahan pengajaran, perbaikan terhadap manajemen sekolah. Namun masih ada perbedaan mutu sekolah yang mencolok antar daerah yang satu dengan lainnya, antara kota yang satu dengan kota lainnya, antara desa yang satu dengan desa lainnya. Apalagi dengan hadirnya otonomi daerah khususnya di bidang pendidikan ini semakin memperlebar disparitas mutu pendidikan.

Dunia pendidikan kita masih mengalami banyak problem yang harus dibenahinya, termasuk di dalamnya adalah persoalan kualitas guru. Ada beberapa tantangan untuk peningkatan mutu dan tenaga kependidikan di Indonesia menurut Bank Dunia antara lain: kekurangan guru, distribusi guru yang tidak merata, rendahnya kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan, ketidaksesuaian latar belakang pendidikan guru, rendahnya kesejahteraan, manajemen pendidik dan tenaga kependidikan yang belum tertata, kompleksitas implementasi UU Guru (Chan, 2005:53).

Di Jawa Timur sendiri mutu guru masih menjadi persoalan tersendiri seperti di tiga Kabupaten Sidoarjo, Mojokerto dan Sumenep. Di ketiga Kabupaten tersebut mutu guru baik, SD, SMP dan SMA/SMK masih perlu dibenahi. Demikian pula di tiga kecamatan Kabupaten Sidoarjo yaitu kecamatan Sidoarjo, Tulungan dan kecamatan Jabon guru SD yang layak untuk mengajar rata-rata masih berada

di bawah 50%. Demikian pula di tiga kecamatan Mojokerto yaitu Mojosari, Sooko, Gedeg menunjukkan hal yang sama bahwa mutu guru masih menjadi persoalan. Persoalan mutu guru sekolah dasar juga dialami oleh Kabupaten Sumenep, di tiga kecamatan juga menunjukkan kualitas guru sekolah dasar rendah. Demikian pula kualitas guru SMP dan SMA/SMK masih ada persoalan. Secara keseluruhan bahwa guru Taman Kanak-Kanak sebanyak 74%, Sekolah Dasar yang tidak layak mengajar di Jawa Timur sebanyak 34%, guru SMP yang tidak layak mengajar sebanyak 71% sedangkan guru SMA yang tidak layak mengajar sebesar 46% (Sumber: data dari Profil Pendidikan Jatim, 2003-2004, dalam Roesminingsih). Pemerintah telah mengeluarkan berbagai regulasi antara lain UUNo. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, PP 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan dan UU No. 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, yang didalamnya antara lain mengharuskan sertifikasi guru dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi guru. Namun sertifikasi telah dilakukan oleh pemerintah, menurut Menteri Pendidikan Nasional Muhammad Nuh ternyata sertifikasi tidak meningkatkan kompetensi guru (Kompas, 8 Nopember 2010).

Mengingat guru merupakan pemeran utama dalam proses belajar mengajar, dan guru dipandang sebagai gudang ilmu dan tempat bertanya bagi siswa, maka kompetensi guru untuk mengajar mendesak untuk dikaji lebih mendalam. Sedangkan permasalahan yang hendak dikaji adalah 1. Sejauhmana kompetensi kualitas SDM guru SMAN perkotaan di Jawa Timur? 2. Bagaimana tingkat perbandingan kompetensi

keempat Daerah Penelitian? 3. Kebijakan apa saja yang ditempuh oleh pemerintah daerah dalam mengimplementasikan PP No.19 Tahun 2005 sebagai upaya meningkatkan kapasitas kompetensi guru SMA negeri perkotaan?

TINJAUAN PUSTAKA

Implementasi Kebijakan

Kebijakan yang baik tidak memiliki arti apa-apa jika tidak diimplementasikan. Apabila sebuah kebijakan telah ditetapkan, maka proses perumusan kebijakan menginjak tahapan implementasi. Tahap ini melibatkan serangkaian kegiatan yang meliputi pemberitahuan kepada publik mengenai pilihan kebijakan yang diambil, instrumen kebijakan yang digunakan, staf yang akan melaksanakan program, pelayanan-pelayanan yang akan diberikan, anggaran yang telah disiapkan, dan laporan-laporan yang akan dievaluasi (Edi Suharto, 2007:36)

Kebijakan publik pada intinya merupakan ekspresi dari *political will*, kemauan dan komitmen pemerintah. Kebijakan publik tidak dapat dipisahkan dari konteks kelembagaan. Kebijakan adalah alat pemerintah dalam mencapai agenda politik dan tujuan-tujuannya (Edi Suharto, 2007:44). Menurut Grindle (1980:6-15), proses kebijakan pada dasarnya meliputi 3 aspek, yaitu : tujuan kebijakan, aktivitas pelaksanaan dan hasil yang dicapai. Dalam pandangan Grindle keberhasilan implementasi suatu kebijakan akan sangat ditentukan oleh "*Content, Context dan Administrative*" dari kebijakan. *Content* (isi) dari kebijakan merupakan faktor penting dalam menentukan hasil dari prakarsa

implementasi. Namun juga sangat ditentukan oleh kondisi sosial politik dan ekonomi yang ada. Sedangkan Anderson (1978 :92) mengungkapkan aspek penting dalam implementasi :1). siapa yang dilibatkan dalam imlementasi; 2). hakekat proses administrasi; 3). kepatuhan atas suatu kebijakan; 4). efek dan dampak dari implementasi isi kebijakan. Keempat aspek tersebut merupakan suatu rangkaian yang tidak terputus dan setiap kebijakan yang telah ditetapkan untuk diimplementasikan selalu didahului oleh penentuan unit pelaksana yang oleh Anderson disebut "*Administrative Unit*" yaitu jajaran birokrasi publik mulai dari level atas sampai pada level birokrasi yang paling rendah.

Kompetensi Pedagogik

Kompetensi diartikan sebagai pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dasar yang tercermin dalam kebiasaan berpikir dan bertindak (Dikdasmen, 2003:3). Kompetensi tersebut akan terwujud dalam bentuk penguasaan pengetahuan dan perbuatan secara profesional dalam menjalankan fungsinya sebagai guru. Kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki (penjelasan pasal 28 ayat 3 butir a PP 19 tahun 2005). Kompetensi pedagogik, subkomponen pengelolaan pembelajarannya berupa penyusunan rencana pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, penilaian prestasi anak

didik dan tindak lanjut hasilnya². Kompetensi pedagogik meliputi pemahaman wawasan/landasan terhadap kependidikan, peserta didik, kurikulum, perancangan pembelajaran yang dialogis dan mendidik, pelaksanaan pembelajaran, sampai kepada pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan potensi yang dimilikinya³. Pendekatan pengetahuan bermuatan pedagogis berdasarkan pendekatan Shulman yang telah dibuktikan oleh Cochran et.al, (1993) menekankan bahwa pengetahuan dan kemampuan seorang guru harus mencakup 4 aspek berikut (Shin Leou, 1998:103); 1. Pengetahuan akan subyek-subyek khusus; 2. Kemampuan mengajar secara umum; 3. Pengetahuan akan latar belakang siswa (seperti kemampuan belajar siswa, usia dan lain-lain); 4. Pengetahuan akan lingkungan (meliputi aspek sosial, politik dan budaya).

Kompetensi Kepribadian

Kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia (penjelasan pasal 28 ayat 3 butir b PP 19 tahun 2005). Selain itu guru harus memiliki kepribadian sebagai insan kamil yang secara konkret dapat dijadikan acuan oleh siswa dalam menemukan contoh pribadi yang memiliki relegiusitas, moral, dan etik.

Selain itu kompetensi kepribadian diharapkan guru memiliki jiwa pendidik, terbuka, mampu mengendalikan dan mengembangkan diri dan memiliki integritas kepribadian⁴. Menurut Herkulanus Agus⁵ 1. kompetensi kepribadian yang mantap dan stabil memiliki indikasi esensial, bertindak sesuai dengan norma hukum, bertindak sesuai dengan norma sosial, bangga sebagai guru, dan memiliki konsistensi dalam bertindak sesuai dengan norma. 2. Subkompetensi kepribadian yang dewasa memiliki indikator esensial, menampilkan kemandirian dalam bertindak sebagai pendidik yang memiliki etos kerja sebagai guru. 3. Subkompetensi kepribadian yang arif memiliki indikator esensial menampilkan tindakan yang didasarkan pada pemanfaatan peserta didik, sekolah dan masyarakat serta menunjukkan keterbukaan dalam berpikir dan bertindak. 4. subkompetensi kepribadian yang berwibawa memiliki indikator esensial, memiliki perilaku yang berpengaruh positif terhadap peserta didik dan memiliki perilaku yang disegani. 5. Subkompetensi mengembangkan peserta didik untuk mengaktualkan berbagai potensinya, memiliki indikator esensial, memfasilitasi peserta didik untuk mengembangkan berbagai potensi akademik dan memfasilitasi peserta didik untuk mengembangkan berbagai potensi non akademik. Kompetensi kepribadian menurut Saiful Adi

²) Agung Nugroho, Mahasiswa Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta, <http://www.indonesia.com/Bpos/012007/30/opini/opini2.htm>.

³) Reno Rajagukguk, Sertifikasi Guru Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan, <http://www.pontiankpost.com/berita/index.asp/berita=Opini&id=132306>

⁴) Agung Nugroho, Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta, <http://www.indonesia.com/Bpos/012007/30/opini/opini2.htm>.

⁵) Herkulanus Agus, <http://kakurakatup.blogspot.com/>

diantaranya: (1) kemampuan yang berhubungan dengan pengalaman ajaran agama sesuai dengan keyakinan agama yang dianutnya; (2) kemampuan untuk menghormati dan menghargai antarumat beragama; (3) kemampuan untuk berperilaku sesuai dengan norma, aturan, dan sistem nilai yang berlaku di masyarakat; (4) mengembangkan sifat-sifat terpuji sebagai seorang guru misalnya sopan santun dan tata krama dan; (5) bersikap demokratis dan terbuka terhadap pembaharuan dan kritik.

Kompetensi Profesional

UU No. 14 Tahun 2005 dikenal dengan UU Guru dan Dosen pasal 2 ayat (1) antara lain menyebutkan bahwa guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang menengah. Sementara yang dimaksud profesional dalam UU ini pasal 1 butir 1 (4) yang menyatakan bahwa profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. Kompetensi profesional (penjelasan pasal 28 ayat 3 butir c PP 19 tahun 2005) adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkannya membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan.

Profesional bisa dimaknai sebagai ahli (*expert*), tanggungjawab (*responsibility*), baik intelektual maupun moral, dan memiliki rasa kesejawatan. Kompetensi profesional, subkomponen akademik atau vokasionalnya adalah penguasaan materi sesuai studi mata pelajaran. Kompetensi profesional⁷ merupakan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam, yang mencakup penguasaan materi kurikulum mata pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materinya, serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuannya.

Kompetensi profesional menurut Saiful Adi tingkat keprofesionalan seorang guru dapat dilihat dari kompetensi sebagai berikut: (1) kemampuan untuk menguasai landasan kependidikan; (2) pemahaman dalam bidang psikologi pendidikan; (3) kemampuan dalam penguasaan materi pelajaran sesuai dengan bidang studi yang diajarkannya; (4) kemampuan dalam mengaplikasikan berbagai metodologi dan strategi pembelajaran; (5) kemampuan merancang dan memanfaatkan berbagai media dan sumber belajar; (6) kemampuan dalam melaksanakan evaluasi pembelajaran; (7) kemampuan dalam menyusun program pembelajaran; (8) kemampuan dalam melaksanakan unsur penunjang; (9) kemampuan dalam melaksanakan penelitian dan berpikir ilmiah untuk meningkatkan kinerja⁸.

6) Saiful Adi, kompetensi yang harus dimiliki seorang guru, <http://saiful.wordpress.com/2007/01/06/kompetensi-yang-harus-dimiliki-seorang-guru/> diakses 02/01/2008

7) Herkulanus Agus, <http://kakurakatup.blogspot.com>

8) Saiful Adi, Kompetensi yang harus dimiliki seorang guru, <http://saiful.wordpress.com/2007/01/06/kompetensi-yang-harus-dimiliki-seorang-guru/> diakses 02/01/2008.

Kompetensi sosial

Kompetensi sosial adalah kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orangtua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar (penjelasan pasal 28 ayat 3 butir d PP 19 tahun 2005). Kompetensi sosial bermakna guru dituntut mampu berperan maksimal dan ideal dalam berbagai tatanan pergaulan dengan berbagai kalangan dan variasi pandangan .Kompetensi sosial, yaitu berpartisipasi dalam kegiatan kelembagaan dan masyarakat. Kompetensi sosial menurut Herkulanus Agus (hakekatnya hampir sama dengan penjelasan pasal 28 ayat 3 butir d PP 19 tahun 2005) merupakan kemampuan guru untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali dan masyarakat sekitar. Sedangkan menurut Saiful Adi kompetensi sosial adalah berhubungan dengan kemampuan guru sebagai anggota masyarakat dan sebagai makhluk sosial, meliputi: (1) kemampuan untuk berinteraksi dan

berkomunikasi dengan teman sejawat untuk meningkatkan kemampuan profesional; (2) kemampuan untuk mengenal dan memahami fungsi-fungsi setiap lembaga kemasyarakatan dan;(3) kemampuan untuk menjalin kerjasama baik secara individual maupun secara kelompok.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam peneltian ini adalah kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan sebagai upaya mengidentifikasi, memahami, menggambarkan, dan menginterpretasikan informasi secara komprehensif tentang kualitasSDM guru.

Penelitian diambil di empat Kota, yaitu Kota Kediri, Madiun, Mojokerto, dan Kota Probolinggo. Populasi dalam penelitian ini adalah semua guru SMA Negeri perkotaan yang berada di wilayah empat kota tersebut. Metode pengambilan sampel guru menggunakan proporsional stratified random sampling berdasarkan mata pelajaran yang diampu/diajarkan masing-masing diambil sebanyak 30%.

Tabel 1. Populasi dan sampel Penelitian

No	Lokasi Penelitian	Banyaknya SMAN	Populasi	Sample (30%)
1	Kota Kediri	8 (delapan) sekolah	608	182
2	Kota Mojokerto	3 (tiga) sekolah	203	61
3	Kota Madiun	6 (enam) sekolah	416	125
4	Kota Probolinggo	4 (empat) sekolah	224	67
	Jumlah	21 (dua puluh satu) sekolah	1392	435

9) Abdul Hasim, Dosen Kpopertis Wialayh IV, Pengurus PGRI dan Dewan Pendidikan Kabupaten Garut, Kandidat Doktor pada Pascasarjana UPI, Kompas Jawa Barat, Kamis, 07 Juni 2007 <http://kompas.com/kompas-cetak/0706/07/jabar/22718.htm>

Data dan informasi yang dibutuhkan dalam studi ini berupa data primer maupun data sekunder. Data primer diperoleh melalui kuesioner, wawancara, dengan guru maupun dengan dinas pendidikan setempat. Sedangkan data sekunder diperoleh dari data dinas pendidikan. Kemudian data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif, baik kuantifikasi data maupun penjelasan deskriptif terhadap kompetensi guru, maupun implementasi PP 19 tahun 2005 sebagai upaya meningkatkan mutu pendidikan.

Langkah-langkah dalam analisis kualitatif deskriptif dalam penelitian ini adalah data yang terkumpul disusun dalam bentuk tabulasi dengan menghitung frekuensi dalam nilai mutlak dan persentase. Data tersebut dilakukan analisis deskriptif untuk mengetahui gambaran tentang kompetensi SDM guru, baik pedagogik, kepribadian, profesional, maupun sosial, dengan menggunakan beberapa pendekatan seperti metode grafis dan analisis tabulasi silang (*crostabulation*). Kemudian menghitung nilai masing-masing sub indikator, nilai indikator,

indeks kompetensi baik paedagogik, kepribadian, profesional, sosial, maupun indeks total. Adapun rumus untuk masing-masing indeks maupun keseluruhan adalah sebagai berikut:

$$\bullet \text{ Nilai (Indikator, sub indikator)} = \frac{((1*f)+(2*f)+(3*f)+(4*f))}{\Sigma f}$$

dimana f adalah frekuensi jawaban responden untuk yang bernilai persepsi 1 maupun 2, 3, dan 4, sedangkan Σf adalah jumlah responden.

$$\bullet \text{ Indeks Kompetensi (variabel } (X_{1,2,3})) = \frac{\Sigma \text{ Nilai Indikator}}{\Sigma \text{ Indikator}}$$

$$\bullet \text{ Indeks Total} = \frac{\Sigma \text{ Indeks kompetensi}}{\Sigma \text{ Jenis kompetensi}}$$

Selanjutnya diberikan penjelasan secara deskriptif terutama terhadap upaya menggambarkan keadaan yang terungkap berdasarkan nilai-nilai yang terdapat dalam perhitungan nilai indikator, nilai sub indikator, indeks kompetensi maupun indeks total.

Tabel 2. Interpretasi Nilai Indikator, Indeks Kompetensi dan Indeks Total

Nilai Persepsi	Nilai Indikator, Indeks Kompetensi dan Indeks Total	Konversi Nilai Indikator, Indeks Kompetensi dan Indeks Total	Interpretasi
1	1,00 – 1,75	25,00 – 43,75	Tidak baik
2	1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	Kurang baik
3	2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	Baik
4	3,26 – 4,00	81,26 – 100,00	Sangat baik

10) Rumusan ini diadopsi dari SK Menpan No:Kep/25/M.PAN/2004 2/tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit pelayanan Instansi Pemerintah

Interpretasi terhadap nilai indikator, maupun indeks total sebagaimana nilai sub indikator, indeks kompetensi, nampak pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3. Kompetensi pedagogik

No	Indikator/Sub indikator	Rata2 Skor				Total rata2 skor	Kualifikasi
		Kota Kediri	Kota Mojokerto	Kota Madiun	Kota Probolinggo		
1	Kemampuan menyusun program pembelajaran	2,33	3,35	3,09	3,38	3,03	Baik
2	Pelaksanaan pembelajaran	1,72	2,33	2,17	2,68	2,22	Kurang baik
3	Kemampuan melaksanakan evaluasi pembelajaran	2,33	2,89	2,80	2,97	2,74	Baik
4	Pemahaman bidang psikologi pendidikan	2,19	2,72	2,61	2,67	2,54	Baik
5	Fasilitasi peserta didik untuk pengembangan potensi non akademik	1,79	1,86	1,88	1,93	1,86	Kurang baik
Total rata-rata skor		10,36	13,15	12,55	13,63	12,42	
Rata-rata Skor Variabel		2,07	2,63	2,51	2,73	2,48	Kurang baik

Sumber: data primer diolah, 2010

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kompetensi Pedagogik

Kompetensi pedagogik yang paling tinggi adalah Kota Probolinggo dengan rata-rata skor 2,73 kategori baik. Demikian juga Kota Mojokerto kompetensi pedagogiknya dalam kategori baik dengan rata-rata skor 2,63. Kompetensi dalam kategori baik juga didapat Kota Madiun dengan rata-rata skor 2,51. Namun ada pula yang mendapatkan kompetensi kurang baik yaitu guru-guru Kota Kediri.

Pada indikator kemampuan dalam menyusun program pembelajaran mendapatkan total rata-rata skor dalam kategori baik (3,03). Indikator kemampuan dalam menyusun program pembelajaran sebegini besar mendapatkan rata - rata

skor dalam kategori baik seperti guru-guru di Kota Mojokerto (3,35), Madiun (3,09) dan Probolinggo mendapatkan rata-rata skor sebesar 3,38. Namun ada pula pada indikator ini mendapatkan rata-rata skor kurang baik, yaitu guru-guru Kota Kediri. Kemudian pada indikator pelaksanaan pembelajaran mendapatkan total rata-rata kurang baik (2,22). Pada indikator ini hampir semuanya mendapatkan rata-rata skor kurang baik. Namun untuk guru Kota Probolinggo mendapatkan rata-rata skor dalam kategori baik.

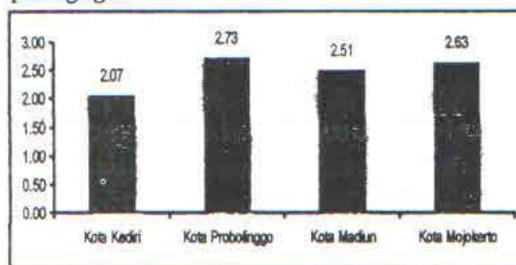
Kompetensi pedagogik guru pada indikator kemampuan dalam melaksanakan evaluasi pembelajaran di empat daerah penelitian mendapatkan rata-rata skor baik (2,74). Namun ada pula yang mendapatkan rata-rata skor kurang baik

terutama terdapat pada guru Kota Kediri. Pada indikator pemahaman dalam bidang psikologi pendidikan mendapatkan total rata-rata skor baik. Namun tidak semuanya mendapatkan rata-rata skor baik. Kemudian pada indikator fasilitasi peserta didik untuk pengembangan potensi non akademik mendapatkan total skor rata-rata kurang baik.

Yang terdiri dari indikator kemampuan dalam menyusun program pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, kemampuan dalam melaksanakan evaluasi pembelajaran, pemahaman dalam bidang psikologi pendidikan dan indikator fasilitasi peserta didik untuk pengembangan potensi non akademik mendapatkan total rata-rata skor kurang baik hanya sebesar 2,48.

Perbandingan kompetensi pedagogik ke empat daerah penelitian dapat dilihat pada gambar 1 di bawah ini. Dari grafik perbandingan tersebut kompetensi pedagogik yang paling tinggi adalah Kota Probolinggo, kemudian yang paling rendah Kota Kediri.

Gambar 1. Perbandingan Kompetensi pedagogik



Sumber: data primer diolah, 2010

Kompetensi Kepribadian

Keseluruhan kompetensi kepribadian mendapatkan total rata-rata skor sebesar 2,78 dalam kategori baik. Kompetensi kepribadian yang paling tinggi Kota Mojokerto dengan rata-rata skor dalam

kategori sangat baik (3,37). Kemudian yang mendapatkan kualifikasi baik Kota Probolinggo dengan rata-rata skor 2,88, Kota Madiun dengan rata-rata nilai skor sebesar 2,80. Sedangkan kompetensi kepribadian yang mendapatkan kualifikasi kurang baik guru Kota Kediri.

Kompetensi kepribadian dari sisi indikator konsistensi dalam bertindak sesuai norma hukum, norma sosial, dan bangga menjadi guru secara keseluruhan mendapatkan skor rata-rata dalam kualifikasi baik, seperti Kota Kediri mendapatkan rata-rata skor 2,51, Mojokerto mendapatkan rata-rata skor 3,13, bahkan dua daerah penelitian yaitu Kota Madiun dan Probolinggo mendapatkan rata-rata skor dalam kategori sangat baik, yaitu masing-masing 3,34 dan 3,34.

Secara keseluruhan indikator kemandirian dalam bertindak dan memiliki etos kerja sebagai guru mendapatkan total rata-rata skor dalam kualifikasi baik, namun tidak semuanya mendapatkan nilai rata-rata skor baik, seperti guru-guru SMAN Kota Kediri hanya mendapatkan 2,05 dalam kategori kurang baik. Sedangkan untuk dua (2) daerah penelitian yaitu Kota Madiun dan Probolinggo mendapatkan rata-rata skor baik, yaitu masing-masing 2,56 dan 2,65. Bahkan Kota Mojokerto mendapatkan rata-rata skor sangat baik (3,35).

Kemudian indikator kompetensi kepribadian dari sisi penampilan tindakan didasarkan pemanfaatan peserta didik, sekolah, dan masyarakat serta keterbukaan dalam berfikir dan bertindak secara keseluruhan mendapatkan total rata-rata skor dalam kategori baik, yaitu sebesar 2,67. Namun pada indikator penampilan tindakan didasarkan pemanfaatan peserta didik, sekolah, dan masyarakat serta keterbukaan dalam

Tabel 4. Kompetensi Kepribadian

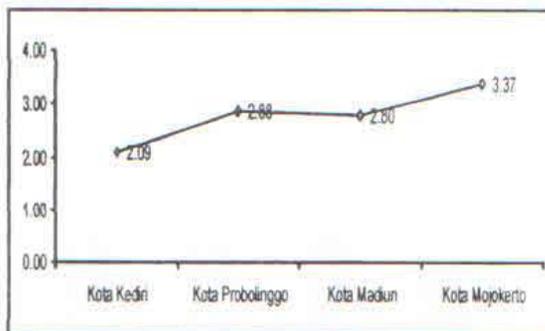
No	Indikator/ Sub indikator	Rata2 Skor				Total rata2 skor	Kualifikasi
		Kota Kediri	Kota Mojokerto	Kota Madiun	Kota Probolinggo		
1	Konsistensi bertindak sesuai norma hukum, norma sosial, dan bangga menjadi guru	2,51	3,13	3,34	3,34	3,08	Baik
2	Kemandirian bertindak dan memiliki etos kerja sebagai guru	2,05	3,35	2,56	2,65	2,65	Baik
3	Penampilan tindakan didasarkan pemanfaatan peserta didik, sekolah, dan masyarakat serta keterbukaan berfikir dan bertindak	1,75	3,62	2,69	2,65	2,67	Baik
Total rata-rata skor		6,28	10,10	8,59	8,64	8,40	
Rata-rata Skor Variabel		2,09	3,37	2,80	2,88	2,78	Baik

Sumber: data primer diolah

berfikir dan bertindak tidak semuanya mendapatkan kategori baik terutama Kota Kediri yang mendapatkan rata-rata skor sebesar 1,75 dalam kategori tidak baik, sedangkan untuk dua (2) daerah penelitian lainnya yaitu Kota Madiun, dan Kota Probolinggo mendapatkan rata-rata skor dalam kategori baik, yaitu masing-masing sebesar 2,69 dan 2,66, bahkan untuk Kota Mojokerto mendapatkan rata-rata skor dalam kategori sangat baik, yaitu sebesar 3,62.

Perbandingan kompetensi kepribadian ke empat daerah penelitian dapat dilihat pada gambar 2. Dari grafik terlihat bahwa kompetensi pedagogik yang paling tinggi adalah Kota Probolinggo dengan nilai rata-rata 2,88 dalam kategori baik, kemudian yang paling rendah Kota Kediri dengan nilai rata-rata skor sebesar 2,09.

Gambar 2. Perbandingan Kompetensi Kepribadian



Sumber: data primer diolah

Kompetensi Profesional

Kompetensi profesional secara keseluruhan ke empat daerah penelitian mendapatkan total skor rata-rata dalam kualifikasi kurang baik (2,50). Kompetensi profesional yang mendapatkan nilai rata-rata skor baik terdapat dua daerah

penelitian yaitu Kota Mojokerto (2,64 dan Probolinggo (2,73). Sedangkan untuk Kota Kediri dan Kota Madiun mendapatkan rata-rata skor kurang baik, yaitu masing-masing 2,27 dan 2,40. Dari berbagai indikator kompetensi profesional yang paling lemah pada indikator kemampuan dalam melaksanakan penelitian & penulisan ilmiah, kondisi seperti ini dapat dilihat pada semua daerah penelitian di Kota Kediri mendapatkan rata-rata skor hanya 2,43, Mojokerto 2,05, Probolinggo 2,11 dan Kota Madiun hanya 1,74.

Kompetensi profesional dilihat dari sisi indikator kemampuan pelaksanaan landasan kependidikan mendapatkan rata-rata skor dalam kualifikasi baik yaitu sebesar 3,07. Daerah penelitian yang kompetensi profesionalnya baik kemampuan pelaksanaan landasan

kependidikan adalah guru-guru SMAN Kota Mojokerto dan Kota Madiun, sedangkan Kota Probolinggo mendapatkan rata-rata skor dalam kualifikasi sangat baik yaitu sebesar 3,44. Namun guru-guru SMAN Kota Kediri mendapatkan rata-rata skor dalam kategori kurang baik (2,42).

Kompetensi profesional dilihat dari sisi indikator kemampuan penguasaan materi pelajaran sesuai bidang studi yang diajarkan secara keseluruhan mendapatkan total skor rata-rata dalam kualifikasi baik (2,84). Indikator yang mendapatkan kualifikasi baik adalah Kota Mojokerto (3,04), Madiun (2,86) dan Kota Probolinggo (3,15). Sedangkan guru-guru yang mendapatkan rata-rata skor kurang baik adalah SMAN Kota Kediri (2,33).

Tabel 5. Kompetensi Profesional

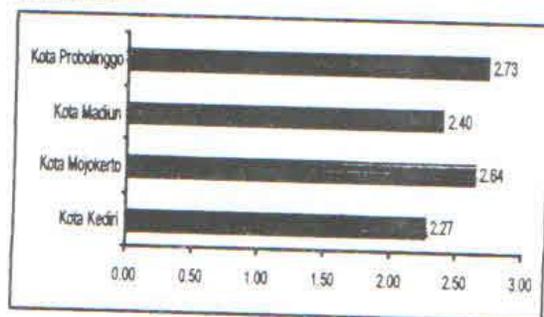
No	Indikator/ Sub indikator	Rata2 Skor				Total rata2 skor	Kualifikasi
		Kota Kediri	Kota Mojokerto	Kota Madiun	Kota Probolinggo		
1	Kemampuan melaksanakan penelitian & penulisan ilmiah	2,43	2,05	1,74	2,11	2,08	Kurang baik
2	Kemampuan pelaksanaan landasan kependidikan	2,42	3,24	3,19	3,44	3,07	Baik
3	Kemampuan penguasaan materi pelajaran sesuai bidang studi yang diajarkan	2,33	3,04	2,86	3,15	2,84	Baik
4	Kemampuan merancang dan memanfaatkan berbagai media dan sumber belajar	1,89	2,24	1,80	2,21	2,03	Kurang baik
Total rata-rata skor		9,07	10,57	9,59	10,92	10,03	
Rata-rata Skor Variabel		2,27	2,64	2,40	2,73	2,50	Kurang baik

Sumber: data primer diolah

Indikator kemampuan merancang dan memanfaatkan berbagai media dan sumber belajar secara keseluruhan mendapatkan total rata-rata skor kurang baik (2,03). Pada indikator kemampuan merancang dan memanfaatkan berbagai media dan sumber belajar semua daerah penelitian mendapatkan rata-rata skor kurang baik, Kota Kediri sebesar 1,89, Madiun 2,24, Mojokerto 1,80 dan Kota Probolinggo sebesar 2,21.

Perbandingan kompetensi profesional ke empat daerah penelitian dapat dilihat pada gambar 3. Pada grafik perbandingan kompetensi profesional tersebut yang paling tinggi adalah Kota Probolinggo sebesar 2,73 dalam kategori baik, kemudian yang paling rendah Kota Kediri dalam kategori kurang baik (2,27).

Gambar 3. Perbandingan Kompetensi Profesional



Sumber: data primer diolah, 2010

Kompetensi Sosial

Kompetensi sosial para guru ke empat daerah penelitian mendapatkan rata-rata skor dalam kualifikasi kurang baik (2,18). Indikator kemampuan dalam berinteraksi dan komunikasi dengan teman sejawat untuk meningkatkan kemampuan profesional mendapatkan total rata-rata skor dalam kategori kurang baik (2,31). Indikator yang

mendapatkan rata-rata skor baik hanya Kota Probolinggo (2,69). Sedangkan ke tiga daerah penelitian Kota Kediri, Mojokerto, Madiun dan Kota Probolinggo mendapatkan rata-rata skor kurang baik.

Indikator kemampuan mengenal dan memahami fungsi-fungsi setiap lembaga kemasyarakatan ke empat daerah penelitian mendapatkan total skor rata-rata sebesar 1,99 dalam kualifikasi kurang baik. Kualifikasi kurang baik pada indikator ini terdapat di semua daerah penelitian, masing-masing Kota Kediri sebesar 2,03, Mojokerto 2,43, Madiun 1,74 dan Probolinggo sebesar 1,76.

Kualifikasi kurang baik juga terdapat pada indikator kemampuan untuk menjalin kerjasama dengan mendapatkan total skor rata-rata 2,20. Daerah penelitian yang mendapatkan rata-rata skor baik hanya terdapat di Kota Madiun dengan mendapatkan rata-rata skor sebesar 2,56. Sedangkan ketiga (3) daerah penelitian lainnya, yaitu Kota Kediri, Kota Mojokerto dan Kota Probolinggo mendapatka rata-rata skor kurang baik, masing-masing sebesar 1,94, 2,11 dan 2,19.

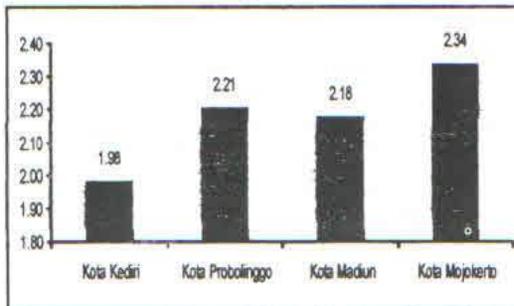
Perbandingan kompetensi sosial ke empat daerah penelitian dapat dilihat pada gambar 4. Pada grafik perbandingan kompetensi sosial tersebut yang paling tinggi adalah Kota Mojokerto dengan nilai rata-rata skor sebesar 2,34. Nilai sebesar 2,34 masih dalam kategori kurang baik, kemudian yang paling rendah Kota Kediri dengan nilai rata-rata skor sebesar 1,98 dalam kategori kurang baik.

Tabel 6. Kompetensi Sosial

No	Indikator/Sub indikator	Rata2 Skor				Total rata2 skor	Kualifikasi
		Kota Kediri	Kota Mojokerto	Kota Madiun	Kota Probolinggo		
1	Kemampuan interaksi dan komunikasi dengan teman sejawat untuk meningkatkan kemampuan profesional	1,98	2,38	2,26	2,69	2,31	Kurang baik
2	Kemampuan mengenal dan memahami fungsi setiap lembaga kemasyarakatan	2,03	2,43	1,74	1,76	1,99	Kurang baik
3	Kemampuan untuk menjalin kerjasama	1,94	2,11	2,56	2,19	2,20	Kurang baik
Total rata-rata skor		5,95	7,03	6,55	6,63	6,54	
Rata-rata Skor Variabel		1,98	2,34	2,18	2,21	2,18	Kurang baik

Sumber: data primer diolah

Gambar 4. Perbandingan Kompetensi Sosial



Sumber: data primer diolah, 2010

Kebijakan Daerah Dalam Mengimplementasikan PP No. 19 Tahun 2005

Implementasi Kebijakan PP 19 Th 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan di daerah dengan tujuan untuk mengetahui kebijakan daerah yang dilakukan dalam upaya untuk meningkatkan kompetensi Guru SMA Negeri Perkotaan yang menjadi locus penelitian ini. Kebijakan PP No 19 Tahun 2005 itu sifatnya teknis dalam mengatur Standar Nasional Pendidikan termasuk didalamnya mengatur kompetensi sumberdaya manusia Guru SMA di daerah. Oleh karena itu daerah

hanya membuat satu kebijakan daerah untuk mengimplementasikannya. Kebijakan daerah tersebut antara lain berupa Pembentukan Tim Pengembangan Kurikulum dengan Surat Keputusan (SK) Walikota. Selanjutnya untuk kepentingan meningkatkan kompetensi guru SMA di daerahnya masing-masing, mengaturnya melalui kebijakan SK Kepala Dinas Pendidikan atau kebijakan Kepala Sekolah SMA yang bersangkutan.

Di empat (4) kota yang menjadi locus penelitian semua Dinas Pendidikan Kota membuat SK Kepala Dinas Pendidikan tentang Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP). Melalui forum kegiatan MGMP ini diharapkan dapat meningkatkan kompetensi guru SMA baik kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, maupun sosial. Sebagai contoh: bila seorang guru mendapatkan pelatihan atau workshop kurikulum, metodologi, IT atau pelatihan atau workshop dalam bidang apapun, maka guru tersebut harus menjelaskan dalam forum MGMP.

Kebijakan, program atau kegiatan yang dibuat oleh Dinas Pendidikan Kota atau oleh Kepala Sekolah SMA dalam upaya meningkatkan kompetensi Guru SMA di daerahnya masing-masing berbeda antara kota yang satu dengan lainnya. Program tersebut dapat digambarkan sebagai berikut: 1. Program peningkatan mutu guru SMP/SMA; 2. Program Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP); 3. Mengadakan Workshop kurikulum; 4. Program satu guru satu laptop (sagusala);

5. Mengadakan Workshop metodologi penelitian; 6. Mengadakan Outbond; 7. Pendidikan dan pelatihan Informasi Teknologi; 8. Bantuan beasiswa pendidikan S1 dan S2 untuk 3 orang; 9. Penilaian kinerja Guru untuk memberi *reward* atau *punishment*; 10. Program pembelajaran aktif, kreatif, dan menyenangkan (Pakem); 11. Pelatihan kompetensi guru MGMP; 12. Program daerah binaan penanaman bakau / hutan mangrove

Tabel 7. Tindakan Daerah Dalam Upaya Meningkatkan Kompetensi Guru SMA

Daerah Penelitian	Kompetensi Guru SMA			
	Pedagogik	Kepribadian	Profesional	Sosial
Kota Madiun	1. MGMP 2. penilaian kinerja 3. beasiswa S1 dan S2	1. MGMP 2. program Outbond 3. penilaian kinerja	1. MGMP 2. penilaian kinerja 3. beasiswa S1 dan S2 4. workshop metodologi penelitian	1. MGMP 2. penilaian kinerja
Kota Kediri	1. MGMP 2. beasiswa S2 3. workshop kurikulum	1. MGMP	1. MGMP 2. beasiswa S2 3. Diklat IT	1. MGMP
Kota Mojokerto	1. MGMP 2. Pelatihan kompetensi guru MGMP 3. program pakem	1. MGMP	1. MGMP workshop metodologi penelitian	1. MGMP
Kota Probolinggo	1. MGMP	1. MGMP	1. MGMP 2. program sagusala 3. workshop metodologi penelitian	1. MGMP 2. program daerah binaan

Sumber: data primer diolah

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Dari sisi kompetensi pedagogik, profesional, maupun sosial ke empat daerah penelitian menunjukkan kompetensinya masih dalam kualifikasi

kurang baik. Kondisi seperti ini menunjukkan bahwa kualitas SDM guru SMAN Perkotaan di daerah penelitian dari sisi kompetensi pedagogik, kompetensi profesional maupun sosial masih belum memenuhi PP 19 tahun 2005 dan sekaligus menunjukkan bahwa

PP tersebut belum sepenuhnya diimplementasikan dengan baik. Berbeda dengan kompetensi kepribadian menunjukkan kompetensinya dalam kategori baik.

Mengenai kebijakan daerah untuk mengimplementasikan PP 19 tahun 2005 di daerah penelitian sudah dilakukan dengan mengeluarkan berbagai kebijakan daerah. Kebijakan PP No 19 Tahun 2005 sifatnya sudah teknis, yaitu termasuk didalamnya mengatur kompetensi Guru SMA di daerah. Oleh karenanya untuk mengimplementasikannya daerah hanya membuat satu kebijakan daerah, berupa Surat Keputusan (SK) Walikota tentang Tim Pengembangan Kurikulum. Selanjutnya untuk kepentingan meningkatkan kompetensi guru SMA pengaturannya melalui kebijakan Kepala Dinas Pendidikan atau dari kebijakan Kepala Sekolah SMA. Kebijakan, program atau kegiatan yang dibuat oleh Dinas Pendidikan Kota atau oleh Kepala Sekolah SMA dalam upaya meningkatkan Kompetensi Guru SMA tindakannya berbeda antara kota satu dengan kota lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan daerahnya.

Saran-saran

Dari hasil penelitian di empat Kota diketemukan bahwa kompetensi SMAN tidak semua mempunyai kompetensi yang baik. Sehingga diperlukan suatu kebijakan daerah agar lebih terfokus dalam upaya meningkatkan kompetensi guru. Secara teknis kebijakan yang diperlukan untuk meningkatkan kompetensi guru tersebut antara lain berupa. Pertama, mengefektifkan forum MGMP, Workshop kurikulum, Workshop metodologi penelitian dan pendampingan

penulisan, beasiswa pendidikan S1 dan S2, Pendidikan dan pelatihan Informasi Teknologi dan lain-lain.

Kedua, Perlu dibentuk *team teaching* (tim pengajar) untuk mengatasi kelemahan materi ajar, metodologi pembelajaran. Dalam team ada guru yang senior yang mengerti kapasitas bidang studi yang bersangkutan. Selain itu harus ada evaluasi dan pelaporan di dalam melakukan tugas-tugas pengajaran maupun pengembangan bidang studi yang bersangkutan diantara anggota *team teaching*.

Ketiga, adanya beberapa kelemahan pada kompetensi sosial, maka untuk meningkatkannya diperlukan adanya training ataupun outbond yang ada kaitannya dengan penampilan diri, tehnik-tehnik memotivasi dan leadership, serta menjalin kerjasama.

Keempat, kompetensi profesional guru menunjukkan kelemahannya terutama pada indikator pelaksanaan penelitian (PTK). Berkaitan hal tersebut diperlukan diklat ataupun workshop tentang metodologi penelitian (PTK) dan penulisan karya ilmiah dan diklat yang sejenisnya secara terus menerus. Disamping itu diperlukan asistensi pembimbingan bagi guru dalam melakukan penelitian (PTK) dan penulisan karya tulis ilmiah. Baik itu dalam rangka menyusun proposal penelitian hingga sampai pada pembuatan laporan penelitian, dan penulisan naskah ilmiah untuk dipublikasikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Reni-Hawadi et.al., 2001. *Kurikulum Berdifensiasi*. Jakarta: PT Grasindo.
- Aqip, Zainal, 2002. *Profesionalisme Guru dalam Pembelajaran*, Surabaya : Insan Cendika.
- Bahri Jamarah dan Syaiful, 2000. *Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bambang Indriyanto, (Dalam Mahdiansyah dkk.), 2003. *Telaah Kecenderungan Permasalahan Pendidikan*, Jakarta, Pusat Penelitian Kebijakan Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional.
- Chan, Sam M dan Sam, Tuti T. 2005. *Kebijakan Pendidikan Era otonomi Daerah*, Jakarta : PT Rajagrafindo Persada.
- Cherrington, David, 1994. *Organizational Behavior: The Management of Individual and Organizational Performance*, Boston.
- Djiwandono, Sri Esti Wuryani, 2002. *Psikologi Pendidikan*, Jakarta, Gramedia Widiasarana.
- Golesman, Daniel 1999. *Kecerdasan Emosi untuk Mencapai Puncak Prestasi*, Terjemahan Alex Tri Kantjono Widodo, Jakarta: PT Gramedia.
- Hamalik, Oemar. 2002. *Pendidikan Guru: Berdasarkan Pendekatan Kompetensi*, Jakarta; Gramedia.
- Jiyono, 1987. *Laporan Penelitian Kemampuan Guru tentang IPA dan sarana Pengajaran IPA di Sekolah Dasar*. (laporan tidak diterbitkan, Jakarta, Balitbang Dikbud).
- Moegiadi, Mangindaan. C., & Elley, B.W, 1976. *Penilaian Kualitas Pendidikan di Indoensia : Survei prestasi belajar siswa kelas 6*, Jakarta, Balitbang Dikbud.
- Nawawi, H. Hadari. 1995. *Organisasi Sekolah dan Pengelolaan Kelas*, Jakarta: Gunung Agung.
- Riyanto, Theo. 2002. *Pembelejaran Sebagai Proses Bimbingan Pribadi*, Jakarta: PT Grasindo.
- Sardiman, A.M., 2001. *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sahertian, Piet A., 2000. *Konsep dasar dan Supervisi dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Samana, A. 1994. *Profesionalisme Guru*, Jakarta: Kanisius.
- Syah, Muhibbin, 2004. *Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan. Baru*, Bandung, Remaja Rosdakarya.

Syaukani, HR., 2002. *Titik temu dalam Dunia Pendidikan*, Jakarta: Nuansa Madani.

Subijanto, et.al., 2002. *Studi Kemampuan Guru SD/MI; Penguasaan Matematika dan Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balitbang Depdiknas.

Sudjana, Nana. 2001. *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.

Suharto, Edi., ,2007. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*, Bandung: CV Alfabeta, Cet. Kesatu,.

Wood R. and Bandura A., 1996. *Social Cognitive Theory of Organizational Management: Motivation on Leadership at Work*, edited by Richard M. Steers. Singapore: Mc Graw-Hill Companies, Inc.

Surat Kabar Kompas, Tanggal 2 Mei 2005

Surat kabar Kompas, tanggal 8 Nopember 2010